ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 30761-30765
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

# Tata Kelola Drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

**Evri Yani Br Pinem[1], Zaili Rusli[2]**

[1,2] Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: evripinem22@gmail.com[1], zailirusli@lecturer.unri.ac.id[2]

**Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola drainase dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tata kelola menurut Sedarmayanti yang menggunakan 4 indikator untuk menjawab rumusan masalah yaitu: *coordinating, motivating, communication,* dan *commanding.* Hasil penelitian ini menununjukkan bahwa tata kelola drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci tidak terlaksana atau tidak dikelola dengan baik. Hal ini terbukti dari masih belum berjalannya tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penanganan jangka panjang pada tata kelola drainase, kemudianBidang Sumber Daya Air juga belum memiliki SOP terkait tata kelola drainase. Berdasarkan hasil temuan, maka peneliti menyarankan dibuatnya rencana penanganan jangka panjang agar permasalahan drainase dapat teratasi secara keseluruhan serta Dinas PUPR hendaknnya segera merumuskan dan menerbitkan SOP demi kelancaran Dinas PUPR menjalankan tugas dan fungsinya khususnya Bidang Sumber Daya Air yang berwenang menangani permasalahan drainase secara teknis..

**Kata kunci:** *Tata Kelola, Drainase, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan*

**Abstract**

This research was carried out in Pangkalan Kerinci District at the Public Works and Spatial Planning Department of Pelalawan Regency. The aim of this research is to find out how drainage is managed and what are the inhibiting factors in the implementation of drainage management in Pangkalan Kerinci District. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. This research uses governance theory according to Sedarmayanti which uses 4 indicators to answer the problem formulation, namely: coordinating, motivating, communicating, and commanding. The results of this research show that drainage management in Pangkalan Kerinci District is not implemented or is not managed well. This is proven by the fact that the duties and functions of the Water Resources Sector are still not running as they should. This can be seen from the lack of long-term handling of drainage management, and the Water Resources Sector also does not have an SOP related to drainage management. Based on the findings, the researchers suggest that a long-term management plan be created so that drainage problems can be resolved as a whole and the PUPR Service should immediately formulate and issue SOPs for the smooth running of the PUPR Service in carrying out its duties and functions, especially the Water Resources Sector which has the authority to handle drainage problems technically.

**Keywords :** *Governance, Drainage, Pangkalan Kerinci Sub District, Pelalawan District.*

## PENDAHULUAN

Adanya infrastruktur dapat mempermudah kegiatan ekonomi disuatu negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan dapat memperbaiki tingkat pendapatan penduduk. Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi maupun dalam menunjang proses pendistribusian (Suswita *et al*., 2020)

Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dan kompleksitas kegiatannya ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan di kawasan perkotaan ini akan menjadi daya tarik masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas ekonominya di kawasan perkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya migrasi yang menambah beban kawasan perkotaaan baik dari sisi ruang maupun intensitas aktivitas.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang di rancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Menurut Suripin (2004) dalam bukunya yang berjudul Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum drainase didfeinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal Suripin dalam (Asmara, 2023). Drainase juga di artikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya pada air permukaan tetapi juga air tanah. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah pernukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai kebutuhan pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, dan banjir. Kegunaan antara lain (Suripin, 2004): a) Mengeringkan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. b) Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. c) Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. d) Mengendalikan air hujan berlebih sehingga tidak terjadi banjir.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu dari 12 Kabupten/Kota di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan memiliki luas sebesar 13.924,94 km persegi dengan jumlah penduduk per akhir 2023 sebanyak 422.445 jiwa. Kota Pangkalan Kerinci merupakan ibukota Kabupaten Pelalawan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Pelalawan. Pangkalan Kerinci juga merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Seiring perkembangannya Kota Pangkalan Kerinci selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan infrastruktur pendukung perkotaan, terutama masalah saran dan prasarana infrastruktur perkotaan, salah satu yang hangat dibicarakan adalah masalah pengelolaan drainase perkotaan. Drainase yang seharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan dan sebagai pengendali saat air hujan melebihi intensitas normal tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sebagaimana mestinya dan berdampak terjadinya banjir dan genangan di kawasan perkotaan.

Menurut WHO (*World Health Organization*) standar drainase yang baik mencakup beberapa hal seperti: a) pengumpulan limbah yang efisien dan aman. b) pengelolaan limbah yang tepat, termasuk penyaringan dan pengolahan yang baik. c) sistem drainase yang dirancang dengan baik untuk menghindari genangan air dan penyebaran penyakit. d)

keberlanjutan sistem drainase untuk menjaga kualitas air dan lingkungan secara keseluruhan. e) pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik untuk kesehatan lingkungan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu fenomena dan menjelaskan temuan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Informan dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi kunci informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan (Latif Busroni, S.T., M.T), Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan (Feri Setiawan, S.T), Camat Kecamatan Pangkalan Kerinci (Junaidi, S.Pd., M.Si), Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota (Ibu Sri Andriani, S.Sos), dan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci (Junita Sari, dan Ibu Heldinar Silaban).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kella Drainase Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

### Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci perlu adanya koordinasi bidang sumber daya air dengan petugas dilapangan yaitu “pasukan kuning”, untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan pimpinan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Feri Setiawan, S.T pada wawancara berikut.

*“Ada petugas lapangan tersendiri untuk membersihkan drainase yaitu kami sebut dengan nama pasukan kuning, yang sering dilihat dijalanan memakai baju kuning. Mereka itu turun lapangan harus ada koordinasi dari kami. Isitilahnya kami hanya memberi perintah saja. Kami hanya mengkoordinasi mereka untuk bertugas, tetapi kami tidak turun langsung kelapangan, hanya memantau seperti inilah. Tetap yang mengerjakannya pasukan kuning tersebut”* **(wawancara dengan Bapak Feri Setiawan S.T pada tanggal 07/03/24)**

### Motivasi

Memberi motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan, dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana yang mendukung dan insentif yang tepat juga dibutuhkan agar kegiatan pengelolaan drainase dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Latif Busroni, S.T., MT Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam wawancara berikut.

“*insentif diberikan berupa honor pelaksana kegiatan yang dibayarkan perbulan, ketika ada pekerjaan fisik terkait drainase baik itu perencanaan, pemabngunan maupun pemeliharaan pasti akan ada insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan tetapi bisa tidak ada kegiatan maka honor juga tidak dapat dianggarkan. Jadi sifatnya hanya tergantung kegiatan saja*” **(wawancara dengan Bapak Latif Busroni, S.T., MT pada 07/03/24)**

### Komunikasi

Dalam Tata Kelola Drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adanya suatu peraturan perundang-undangan tertulis menjadi salah satu cara pemerintah mengkomunikasikan apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan peraturan tersebut. Seperti yang dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Seksi perencanaan Bagian SDA Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Bapak Feri Setiawan, S.T berikut ini.

*“dalam pengelolaan sistem drainase adalah Perda No 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Di dalam bagian dinas pupr terdapat sub bab drainase. Sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan drainase di kota Pekanbaru,mungkin ada bebrapa perda yang*

*menyinggung tentang pengelolaan drainase dan secara tidak langsung mengatur ketentuan tentang drainase akan tetapi saya rasa tidak cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah maupun masyarakat karena selain perda itu tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dan juga contain dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam pengelolaan drainase" (**Wawancara dengan Bapak Feri Setiawan, S.T pada tanggal 07/03/24)***

**Pergerakan**

Menggerakkan kegiatan yang dilaksanakan disebut juga *commanding***.** Dalam memberi perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah – langkah dan resiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi organisasi. *Commanding* juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Terkait dengan pengelolaan drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci dijelaskan melalui wawancara berikut.

*"kami siap melaksanakan kegiatan pengelolaan drainase, apapun terkait tupoksi, apabila kami didukung oleh semua pihak, baik dari segi anggaran, fasilitas, pengetahuan yang cukup buat kami, apabila hal yang paling mendasar saja tidak disupport maka akan seperti apa kami melaksanakan kebijakn tersebut, sia-sia saya rasa, kami butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan atasan kami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini" **(Wawancara dengan Bapak Feri Setiawan, S.T pada tanggal 07/03/24)***

**Faktor Penghambat Tata Kelola Drainase**

**Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan tata Kelola drainase**

Namun pada kenyataannya masih saja ada dari kontarktor yang tidak memasang papan proyek dengan alasan ketika kontraktor memasang papan proyek tersebut maka akan bermunculan pungutan-pungutan liar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga wartawan. Itulah alasan mengapa kontraktor tidak memasang papan proyek yang mengakibatkan masyarakat setempat menjadi tidak mengetahui jumlah anggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan pembangunan drainase tersebut.

**Bidang Sumber Daya Air belum memiliki SOP terkait tata Kelola drainase**

Dengan tidak adanya regulasi atau SOP khusus yang dapat dijadikan acuan oleh Bidang Sumber Daya Air dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugasnya yang dalam hal ini adalah mengelola drainase. Oleh sebab itu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat membuat Undang-undang khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan supaya kinerja seluruh bidang yang ada di dinas tersebut lebih terarah dan teratur.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Tata Kelola Drainase Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat diberikan, diantaranya adalah sebagai berikut: Tata Kelola Drainase Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan jika dilihat dari kedua indikator keberhasilan sebuah tata kelola yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yakni: *coordinating, motivating, communication, commanding* pada realitasnya Bidang Sumber Daya Air ternyata dapat dikatakan belum berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan kenyataannya kualitas kontruksi beton pada drainase kurang memadai, tidak adanya penanganan jangka panjang sebagai perbaikan kualitas drainase dan drainase yang sudah dibangun tidak terawat dengan baik. Selain itu Bidang Sumber Daya Air juga belum memiliki SOP terkait pengelolaan drainase, hal ini mengakibatkan tidak adanya standar ketetapan waktu dalam memproses tata kelola drainase tersebut. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Tata Kelola Drainase Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan adalah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan serta belum adanya SOP yang memuat standar ketetapan waktu dalam tata kelola drainase di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. (n.d.). *Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar.*

Asmara, F. I. (2023). *Evaluasi Sistem Drainase Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Di Daerah Youtefa, Kota Jayapura*. Universitas Islam Indonesia.

Aziz, K. A. (2022). *Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Desa Sendangdalem Kecamatan Parudeso Kabupaten Kebumen*.

Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com

Ilya Sahira, N. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *Natasya Ilya Sahira & Zulkarnaini-Universitas Riau*, *1*(2).

Khairani, N. (2023). *Tata Kelola Drainase Di Kota Pekanbaru*.

Rahayu, A. (2019). *Birokrasi & Governance (Teori, Konsep dan Aplikasinya)*.

Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak A Study On The Implementation Of Good Governance Principles In The Lebak Regency. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *4*(1), 33–48.

Salsabila, U. (2021). *Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah.*

Sandra, W. (2017). Pengelolaan Barang Milik Negara Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. *Jom FISIP*, *4*(2).

Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. PT Refika Aditama.

Soedarno. (n.d.). *Analisis Manajemen Drainase Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Drainase untuk Penanggulangan Banjir: Studi Kasus di Kawasan Pasar Sentral, Jalan Anggrek-Bakung Di Kabupaten Pinrang* .

Sugiyardi, A. (2022). *Urgensi Penerapan Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kabupaten Pamekasan)*.

Suswita, I., Damanik, D., Darasa Panjaitan, P., & Simalungun ABSTRAK, U. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun Oleh. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *2*(1), 2614–7181.

Wulandari, N. (2020). Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl Saleh Abbas Pasar Bawah). *Jom FISIP*, *7*.